

## RESENSI BUKU

Judul	: Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace.
Editor	: F. Budi Hardiman
Penerbit	: Kanisius
Tebal Buku	: vii + 406
Tahun	: 2010

Dalam negara demokratis terminologi ruang publik atau "*public sphere*" merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan ruang publik merupakan persyaratan utama untuk terwujudnya negara demokratis. Ruang publik merupakan keniscayaan dalam demokratisasi, karena ruang publik adalah tempat terjadinya interaksi di antara dua entitas yaitu negara dan masyarakat, secara terbuka dan otonom. Negara demokratis mustahil dapat terwujud apabila ruang publik terkooptasi. Ruang publik adalah wahana tempat terjadinya partisipasi warga yang merupakan inti dari demokrasi. Di ruang publiklah terjadi pembelajaran, baik bagi penyelenggara negara maupun warga masyarakat.

Persoalan ruang publik mulai dari konsep sampai kepada praktiknya dibahas tuntas dalam buku yang ditulis oleh para dosen dan penulis yang telah dikenal publik, yang berkompeten dalam bidang filsafat terutama dari STF Driyarkara. Perkembangan ide tentang kepublikan dan ruang publik yang dikaitkan dengan partisipasi warga dalam perkembangan konsep demokrasi terangkum dalam berbagai tulisan dalam buku ini, sehingga menjadi kumpulan bahasan yang lengkap tentang apa yang dimaksud dengan ruang publik tersebut. Perkembangan konsep, dinamika, dan penggunaan ruang publik diulas dengan komprehensif mulai dari zaman Yunani Kuno, ketika demokrasi berlangsung dalam *polis* (negara kota), sampai pada zaman teknologi informasi, di mana orang menyampaikan aspirasinya di dunia maya

atau *cyberspace*. Kumpulan tulisan dalam buku ini juga menjelaskan berbagai aspek yang perlu kita pahami tentang ruang publik dengan pendekatan sejarah, teologi, seni, arsitektur, dan sosiologi serta kaitannya dengan peran masyarakat dalam demokrasi.

Sebelum membicarakan ruang publik dari berbagai aspeknya, terminologi yang mendapat porsi pembahasan pertama adalah makna dari terminologi kepublikan (*publicity*). Uraian tentang kepublikan ini terangkum dalam bagian pertama dari buku ini, yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Konsep publik muncul seiring dengan kemunculan polis (negara kota) pada zaman Yunani kuno. Kata-kata politik juga dihubungkan dengan polis ini. Namun, kata publik itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *publicus*, yang mempunyai dua makna, yaitu milik rakyat atau negara, dan sesuatu yang bersifat umum. Kedua hal ini berada pada ruang di luar dari daerah kekuasaan *fater familias* (ayah), yang disebut *privatus* (hal-hal yang bersifat privat). Dari *terminologi* *publicus* diderivasi persoalan yang berhubungan dengan *imperium publicum* (kekuasaan publik), *elementia publica* (unsur publik), dan *servus publicus* (pelayan publik), dan lain-lain.

Pengertian *publicus* di Eropa pada abad pertengahan sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat 'duniawi', dan yang bersifat 'gerejawi'. Dari aspek duniawi yang termasuk ke dalam *publicus* ini adalah *officium publicum*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh pejabat, pegawai, dan pemungut pajak (*publicani*). Untuk melakukan tugasnya para

pejabat tersebut dilengkapi dengan *potestas publica* (wewenang publik), dan para pejabat tersebut dinamakan *personae publica* (orang-orang publik). Dalam praktiknya hal ini diatur dengan *ius publicum* (undang-undang publik). Hal yang berkaitan dengan gereja mencakup *votum privatum*, yaitu sumpah yang hanya diucapkan di depan salib, dan *votum publicum*, yakni sumpah yang diucapkan dengan kehadiran para pejabat gereja. Dapat disimpulkan bahwa gagasan tentang *publicus* pada abad ini selalu dikaitkan dengan legitimasi suatu tindakan hukum gereja. Ruang publik pada era ini merupakan tempat orang-orang gereja menyampaikan ajaran mereka. Tempatnya adalah di alun-alun kota (*platz, piazza, atau plaza*).

Pengertian *publicus* secara modern dijelaskan terjadi setelah Abad Pertengahan di Eropa. Pada abad ke 16 sampai ke 17, setelah terjadi perang agama (antara Katolik dan Protestan) selama 30 tahun, di mana konsep negara masih didominasi oleh kekuasaan absolut raja, kata publik dikaitkan dengan kekuasaan negara. Negara berwenang mengumumkan *bellum publicum* (perang yang diumumkan secara publik). Hal ini bahkan berlaku secara internasional. Para penulis yang terkenal di era ini adalah Jean Bodin, Balthasar Avala, Alberico Gentilis, dan Hugo Grotius. Kemudian konsep publik terus berkembang di dalam negeri dengan mengaitkan hubungan-hubungan politis antara kekuasaan tertinggi negara dan yang mewakili kehendak politis seluruh warga negara. Penulis yang terkenal dengan konsep ini adalah Thomas Hobbes, dengan tulisannya yang terkenal *Leviathan*. Sejak inilah konsep publik dikaitkan dengan masyarakat warga (*civil society*).

Setelah abad ke 18 terjadi perkembangan yang sangat pesat tentang kepublikan ini dengan ditemukannya mesin cetak, sehingga berpengaruh terhadap dunia tulis menulis dan publik pembaca. Persoalan publik kemudian menjadi lebih luas lagi dibicarakan. Abad yang terkenal dengan Abad Pencerahan ini, memberikan peluang untuk terbangunnya

institusi-institusi publik, yang dapat melakukan banyak aktivitas publik misalnya pertunjukan dalam konser, teater, tulisan-tulisan di media cetak, termasuk dalam rangka memberikan kritik, penilaian moral, estetis, dan rasional tentang sesuatu. Dengan demikian telah terjadi pergeseran konsep publik dari yang berorientasi kekuasaan negara kepada kedaulatan warga masyarakat.

Konsep publik pada Abad Pencerahan ini diuraikan secara panjang lebar dari pemikiran Immanuel Kant. Menurut Kant publik adalah para aktor yang selalu mampu menggunakan alasan (*reasons*) secara rasional, dan mampu mengungkapkannya secara publik. Publik dalam hal ini adalah setiap individu dalam masyarakat warga, dan orientasi mereka adalah untuk kepentingan moral universal manusia. Kemudian konsep masyarakat warga berkembang berdampingan dengan konsep ruang publik.

Pembahasan tentang ruang publik diawali dengan menguraikan konsep masyarakat warga yang dianalisis dari konsep Locke, Rousseau, Hegel, dan Gramsci. Kemudian ruang publik dihubungkan dengan konsep kapitalisme, ruang publik dan kebudayaan, serta ruang publik dan tantangannya. Menurut Locke masyarakat warga adalah masyarakat politis, dan mengontrol negara. Konsep ini sangat berlawanan dengan apa yang dianut sebelumnya, di mana terjadi pemisahan yang tegas antara raja atau penguasa dan kelas bangsawan, yang berhadapan dengan masyarakat yang apolitis. Kemudian Rousseau mengembangkan konsep ini dengan menempatkan warga tidak hanya sebagai pengontrol, tetapi juga secara aktif menentukan sistem hukum dan menetapkan orang-orang yang akan memimpinya. Namun kemudian Hegel menemukan bahwa masyarakat warga adalah wilayah kehidupan masyarakat tersendiri yang tidak langsung berhubungan dengan bidang politik. Habermas 160 tahun kemudian mengembalikan fungsi politis masyarakat warga dari Hegel ini. Dalam masyarakat

warga terjadi diskursus tentang segala sesuatu yang dilakukan negara sehingga para politisi atau penyelenggara negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang, dan masyarakat warga dapat menentukan arah negara. Terakhir menurut Gramsci masyarakat warga dihubungkan dengan konsep negara di Timur dan Barat. "Di Timur negara merupakan sesuatu yang primordial dan tidak mantap, sedangkan di Barat, ada hubungan yang cocok antara negara dan masyarakat warga. Ketika negara terguncang, tersingkaplah struktur masyarakat warga yang kokoh. Negara adalah parit luar, di baliknya terdapatlah sistem benteng dan garis pertahanan yang kuat" (hal 180).

Gramsci lebih lanjut menjelaskan bahwa masyarakat warga tidak pernah merupakan suatu arena yang netral, di mana orang bisa melakukan perdebatan isu-isu publik dan membentuk opini publik. Sebaliknya masyarakat warga merupakan arena pergulatan yang sarat dengan kepentingan. Dalam pergulatan itu sering terjadi bahwa pihak-pihak yang berkepentingan akan memproyeksikan akal sehat mereka sebagai akal sehat universal guna menarik dukungan dari pihak yang akan dipengaruhinya. Berbeda dengan Gramsci, Habermas mengemukakan bahwa konsep masyarakat warga terlepas dari semua bentuk kekuasaan. Serupa dengan Locke, Habermas menganggap bahwa masyarakat warga semata-mata berhubungan dengan persuasi dan konsensus.

Konsep ruang publik dikaitkan dengan kapitalisme dan pluralisme dibahas secara mendalam pada bagian ketiga buku ini. Dalam bukunya *The Human Condition*, Hannah Arendt, mengulas konsep ruang publik dalam sejarah filsafat politik kontemporer. Buku Arendt adalah kritik terhadap ekonomi pasar yang cenderung mengikis habis solidaritas warga. Pendapat Arendt sejalan dengan pendapat Habermas, seperti tertuang dalam bukunya *Strukturwandel der Öffentlichkeit* (Perubahan Struktur Ruang Publik). Menurut keduanya, sistem kapitalis merupakan ancaman terhadap formasi ruang publik yang otonom di mana ruang itu didominasi oleh

kaum berjouis, atau pemilik uang. Ekonomi pasar tidak begitu saja dapat didamaikan dengan demokrasi. Persoalan ruang publik juga mencakup persoalan ketidakadilan jender, seperti eksklusi perempuan dari persoalan publik, dan pembiaran kekerasan dalam rumah tangga, mendapat porsi pembahasan tersendiri. Kemudian persoalan ruang publik juga meliputi peranan politis kelompok-kelompok religius dalam masyarakat majemuk, bahkan bagaimana para penyair mengartikulasikan pengalaman dan penderitaan manusia dengan memanfaatkan ruang publik menutup bagian tiga buku ini.

Persoalan ruang publik yang sangat omnibus, di mana sejak zaman Pencerahan di Eropa lebih dikaitkan dengan peran politis masyarakat warga dalam negara demokrasi, sekarang sudah melebar ke persoalan-persoalan kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai contoh, media massa dan pasar mengambil alih peran ruang publik. Warga yang konsumeristis berganti peran dari publik menjadi konsumen. Bahkan di era kontemporer ini terjadi krisis ruang publik dengan adanya kekuatan kapitalis kontemporer yang menghasilkan budaya terapeutik dan narsistis. Peran warga yang semula aktif dan berubah menjadi pasif dan konsumtif merupakan sebuah gejala krisis kebersamaan. Kemudian kaitan ruang publik dengan seni-rupa mendapat ulasan yang menarik tentang bagaimana klarifikasi teologis-estetis dalam mengapresiasi karya seni dengan menilai lukisan tubuh-tubuh telanjang pada langit-langit kapel Sistina, di Roma. Selanjutnya bagaimana ruang publik diterjemahkan secara spasial dan arsitektural juga dibahas pada bagian ini. Intinya adalah bagaimana komunikasi dapat berjalan baik sehingga terbangun ruang publik yang sehat, harus didukung oleh aspek-aspek arsitektural, misalnya adanya taman-taman kota, area pejalan kaki, dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Sebagai penutup tidak ketinggalan ulasan tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi telah merevolusi komunikasi publik dengan adanya

ruang publik maya yang disebut *cyberspace*. Dengan demikian partisipasi demokratis juga terjadi dalam dunia maya ini.

Setelah membaca perkembangan konsep dan penggunaan ruang publik sepanjang sejarahnya, mulai dari zaman Yunani kuno dengan konsep polisnya, sampai kepada abad informasi dan globalisasi saat ini, kita memperoleh pencerahan betapa peran ruang publik ini sangat krusial sejalan dengan perkembangan konsep negara dan peran warga masyarakat. Sesuai dengan perkembangan zaman, makna dan peran ruang publik akan selalu bergeser. Dibutuhkan

pertimbangan-pertimbangan kritis dari warga masyarakat untuk bisa memanfaatkan ruang publik agar menjadi ruang yang otonom dan mendatangkan manfaat untuk semua. Buku semacam ini sangat layak untuk dibaca, dan sangat berharga untuk dijadikan buku teks dalam memahami demokrasi karena telah memberikan penjelasan tentang ruang publik secara komprehensif.

Desember, 2013

**Prima Roza**